

EVALUASI DAMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2003

Oleh:

Irma Suryahani¹⁾ dan Sri Murni²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

Evaluation is the part of activities development management to know how the activities development works. Evaluation could be good or bad is depending on the inputs of the monitoring systems. That is aim of this research. By compare indicator descriptions using; Location Quotient, Shift Share and Williamson Index, this research is analyzed. The conclusion is that Purbalingga's PDRB in 2003 1.3 % increase. Although the economic structure, in other side, gap among sectors are low. It means each sector works better and relatively spread evenly. That's why the policy of budget allocation is better to interrelatedness (backward and forward) to each sector.

Keywords: Evaluation, Shift Share, Williamson Index

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan, sangat terbuka lebar untuk terus ditingkatkan dengan diberikannya otonomi daerah yang luas pada daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk merumuskan dan memenuhi tujuan pembangunan daerah yang dirumuskan bersama dengan tetap menjaga makna keberadaannya dalam sebuah sistem pemerintahan dan pembangunan nasional.

Aspek substansi dari pembangunan daerah akan mensyaratkan pengkaitan perencanaannya dengan potensi yang dimiliki daerah, yakni kegiatan pembangunan daerah perlu dikaitkan dengan keunggulan sumberdaya yang dimiliki daerah, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun teknologi. Pertimbangan terhadap potensi daerah ini juga mengungkap perlunya kebijakan pembangunan daerah yang memperhatikan aspek kesinambungan dalam pembangunan daerah. Apabila ini tidak dilakukan dengan tepat, maka pembangunan daerah akan berhadapan dengan masalah ketidak efektifan program pembangunan daerah bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi dan pemanfaatan sumberdaya dan dana dalam pembangunan daerah, serta agar berbagai sasaran dan tujuan pembangunan tercapai secara optimal, maka dalam proses perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan didukung suatu sistem evaluasi sebagai bagian terpadu dengan sistem

perencanaan khususnya dengan manajemen pembangunan pada umumnya.

Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Baik atau tidaknya evaluasi yang dilakukan tergantung dari input yang diperoleh dari sistem monitoring yang dilakukan selama kegiatan berjalan. Dari kegiatan ini diharapkan diperoleh informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak dari kegiatan pembangunan. Selanjutnya informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh sasaran dan tujuan pembangunan yang telah dicapai, sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan ataupun berbagai jenis dampak dari manfaat yang ditimbulkannya yang diperlukan sebagai informasi dan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2003 telah terkait dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan tahun 2003 bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Kajian Evaluasi Dampak Pelaksanaan Pembangunan bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hasil dan dampak pelaksanaan pembangunan sektoral tahun 2003.

METODE ANALISIS

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe Evaluasi Kebijakan Retrospektif, artinya suatu tipe penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang kinerja kebijakan publik yang telah dilaksanakan pada suatu waktu tertentu. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana dampak pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2003, dilihat dari sisi sektoral maupun sisi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui form isian, wawancara mendalam sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi atas berbagai data yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi terkait.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis yang relevan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan pembangunan, yaitu:

Deskripsi Indikator. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi kinerja semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2003. Dalam analisis ini, tidak semua indikator kinerja diberikan deskripsinya, melainkan dibatasi hanya pada deskripsi kondisi tiga indikator pertama, yaitu: masukan, keluaran dan hasil. Penentuan tiga indikator ini didasarkan pada kesepakatan umum bahwa indikator manfaat dan dampak cenderung belum dapat dilihat pengaruhnya secara langsung dalam waktu yang relatif singkat (satu tahun atau kurang) sehingga informasinya akan lebih diarahkan pada "kesimpulan" sebagai bentuk manfaat dan dampak yang diharapkan bila kinerja tiga indikator pertama relatif baik.

Komparasi. Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan pembangunan dengan cara membandingkan antara target/rencana dengan realisasi, atau membandingkan kondisi data antar waktu. Analisis perbandingan atau komparasi data (baik berupa komparasi target-realisasi ataupun komparasi antar waktu) merupakan pilihan alternatif analisis yang paling memungkinkan untuk dilakukan pada kegiatan evaluasi ini.

Location Quotient. Analisis ini digunakan, untuk menentukan sektor-sektor yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Purbalingga. Dalam analisis ini apabila nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut mempunyai tingkat spesialisasi yang lebih tinggi dari rata-rata sektor lain.

Shift Share. Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor yang mempunyai daya kompetitif yang tinggi dan sektor yang dominan sebagai sektor yang mempunyai spesialisasi untuk berkembang.

Indeks Williamson. Analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan, baik kesenjangan wilayah maupun kesenjangan sektoral.

HASIL ANALISIS

Dalam analisis ini, tidak akan digunakan indikator kesejahteraan sosial yang bersifat khusus atau menurut pendapat ahli atau lembaga tertentu, namun lebih ditekankan pada indikator yang bersifat umum dan faktual. Artinya, berbagai indikator tersebut akan lebih dikaitkan dengan fenomena, kondisi dan data kesejahteraan sosial yang terekam secara rutin dan dipublikasi secara resmi.

Tabel 4.1.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purbalingga
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993
Tahun 2000 - 2003 (Jutaan Rupiah)

NO	Lapangan Usaha	PDRB PURBALINGGA (RP)			
		2000	2001	2002	2003
1.	Pertanian	194.945,04	194.348,90	200.723,78	206.780,86
2.	Pertambangan/penggalian	2.034,07	2.208,17	2.186,80	2.326,46
3.	Industri	69.116,56	73.574,61	75.748,35	78.846,59
4.	Listrik	4.989,59	5.342,15	5.753,51	6.440,31
5.	Bangunan	28.550,64	30.216,62	31.292,07	32.561,42
6.	Perdagangan	104.820,81	110.855,78	115.674,89	120.260,17
7.	Pengangkutan dan Kom.	39.415,05	41.020,24	40.227,60	41.340,24
8.	Keuangan	26.007,76	26.668,65	28.363,14	30.213,90
9.	Jasa-jasa	141.785,25	145.630,96	149.656,16	154.396,44
	PDRB	611.664,77	629.866,08	649.626,30	673.166,39
	Pertumbuhan PDRB	2,78%	2,98%	3,14%	3,62%

Sumber: PDRB Kabupaten Purbalingga, 2003

Tabel 4.2.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 2000 - 2002

NO	SEKTOR	PDRB PURBALINGGA		
		2001	2002	2003
1.	Pertanian	0,31	3,28	3,02
2.	Pertambangan dan penggalian	8,56	0,97	6,39
3.	Industri	6,45	2,95	4,09
4.	Listrik	7,07	7,70	11,94
5.	Bangunan	5,84	3,56	4,06
6.	Perdagangan	5,76	4,35	3,96
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,07	1,93	2,77
8.	Keuangan	2,54	6,35	6,53
9.	Jasa-jasa	2,71	2,76	3,17
PDRB		2.98	3,14	3,62

Sumber: PDRB Kabupaten Purbalingga, 2003

Tabel 4.3.
Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 2000 - 2002

NO	SEKTOR	PDRB PURBALINGGA			
		2000	2001	2002	2003
1.	Pertanian	31,87	30,86	30,90	30,72
2.	Pertambangan dan penggalian	0,33	0,35	0,34	0,35
3.	Industri	11,30	11,68	11,66	11,71
4.	Listrik	0,82	0,85	0,89	0,96
5.	Bangunan	4,67	4,80	4,82	4,84
6.	Perdagangan	17,14	17,60	17,81	17,86
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,44	6,51	6,19	6,14
8.	Keuangan	4,25	4,23	4,37	4,49
9.	Jasa-jasa	23,18	23,12	23,04	22,94
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Purbalingga, 2003

Tabel 4.4.
Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 1999 - 2003

TAHUN	PENDAPATAN PER KAPITA	PERTUMBUHAN
1999	Rp. 1.517.211	9,58%
2000	Rp. 1.662.579	9,58%
2001	Rp. 1.894.849	13,97%
2002	Rp. 2.076.734	9,60%
2003	Rp. 2.257.898	8,72%

Sumber: PDRB Kabupaten Purbalingga, 2003

Perkembangan Nilai PDRB. Kemajuan perekonomian makro suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan kinerja pendapatan regionalnya, yaitu dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga cenderung meningkat, pada tahun 2000 nilai PDRB riil sebesar Rp.611.664,77 juta menjadi Rp.649.626,30 (2002). Pada tahun 2003 nilai PDRB riil Kabupaten

Purbalingga menjadi Rp.673.166,39 (Laporan Pertanggungjawaban Bupati 2003).

Pertumbuhan Ekonomi. Dilihat dari pertumbuhannya, selama tiga tahun terakhir perekonomian Kabupaten Purbalingga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 perekonomian mengalami pertumbuhan sebesar 2,98% dan meningkat menjadi 3,14% pada tahun 2002. Pada tahun 2003 perekonomian di

Kabupaten Purbalingga semakin menunjukkan perbaikan yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 3,62 persen. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi dalam PDRB adalah sektor listrik, gas dan air bersih (11,94% tahun 2003), diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (6,53% tahun 2003), serta sektor pertambangan dan penggalian (6,39% tahun 2003).

Perkembangan Kontribusi Sektoral. Diskripsi mengenai perkembangan kontribusi sektoral dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kontribusi (share) dari setiap sektor atau lapangan usaha terhadap total PDRB. Untuk melihat seberapa jauh perkembangan kontribusi (share) dari setiap lapangan usaha terhadap pertumbuhan total PDRB di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada table 4.3

Dari data yang ada diketahui bahwa sektor atau lapangan usaha yang dominan dan memberikan pengaruh terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003 adalah sektor Pertanian. Sektor Pertanian menyumbang 30,72% terhadap total PDRB, kemudian diikuti oleh sektor Jasa-jasa sebesar 22,94%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 17,86%, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 11,71%; dominasi sektor-sektor tersebut cenderung tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa hingga saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan dan sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai basis perekonomian Kabupaten Purbalingga.

Pendapatan Perkapita. Salah satu alat untuk mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dari pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Purbalingga di saat masa recovery ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993 dimana tahun tersebut dijadikan tahun dasar, pendapatan perkapita penduduk sebesar Rp 652.334, meningkat menjadi Rp 2.257.898 pada tahun 2003 yang berarti hampir menjadi tiga kali lipat selama kurun waktu 9 tahun.

Analisis Basis Ekonomi. Untuk melihat sektor-sektor unggulan maupun yang dapat dikembangkan pada suatu daerah, perlu diadakan pilihan untuk diberi tindak lanjut. Pilihan-pilihan yang dilakukan ini mengingat akan efisiensi dan efektivitas dari kelangkaan dana, terlebih lagi karena imbas krisis ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah LQ (Location Quotient).

Dengan diperolehnya indeks LQ dapat diketahui sektor-sektor basis yang sangat penting untuk memacu pembangunan wilayah yang bersangkutan. Sektor basis ditunjukkan oleh nilai indeks LQ yang lebih besar dari 1 ($LQ > 1$), yang menandakan daerah tersebut mempunyai potensi ekspor dalam kegiatan

tertentu. Nilai indeks LQ sama dengan 1 ($LQ = 1$) memperlihatkan daerah yang bersangkutan telah mencukupi dalam kegiatan tertentu (seimbang), dan apabila nilai indeks kurang dari 1 ($LQ < 1$) berarti menunjukkan daerah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan impor daerah lain.

Hasil pengolahan data LQ pada Kabupaten Purbalingga yang dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sektor perekonomian yang berangka indeks $LQ > 1$ dalam perkembangan setiap tahunnya tidak terjadi perubahan yang mencolok, dimana untuk tahun 2002 yaitu: sektor Pertanian, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa-jasa. Sedangkan untuk kondisi tahun 2003 belum dapat diketahui karena data belum tersedia; namun diduga kondisinya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hasil perhitungan LQ dapat dilihat pada tabel 4.5.

Sektor-sektor tersebut menjadi andalan untuk dikembangkan terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis yang mempunyai peluang ekspor ke daerah lain, yang dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap produksi dan pendapatan masyarakat.

Struktur Ekonomi Daerah. PDRB Kabupaten Purbalingga berdasarkan harga konstan tahun 1993, menunjukkan bahwa sektor Pertanian selama kurun waktu 2000 sampai dengan tahun 2002 memberikan kontribusi (economic share) paling besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Secara berturut-turut diikuti oleh sektor Jasa-jasa, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Bangunan, sektor Keuangan, Pariwisata dan Jasa Perusahaan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan terakhir sektor Pertambangan dan Penggalian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum struktur perekonomian Kabupaten Purbalingga belum mengalami perubahan yang signifikan dari struktur perekonomian primer (pertanian) menjadi struktur perekonomian sekunder (industri). Besarnya peranan sektor Pertanian dalam struktur ekonomi di Kabupaten Purbalingga merupakan pencerminan perekonomian daerah yang sebagian besar didominasi oleh penduduk yang bermatapencaharian pada bidang pertanian dalam arti luas.

Tabel 4.5.
Koefisien LQ Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 - 2002

NO	SEKTOR	LQ	
		2001	2002
1	Pertanian	1.39	1.56
2	Pertambangan dan penggalian	0.24	0.22
3	Industri	0.39	0.38
4	Listrik	0.72	0.69
5	Bangunan	1.23	1.19
6	Perdagangan	0.76	0.75
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.27	1.16
8	Keuangan	1.30	1.14
9	Jasa-jasa	2.44	2.37

Sumber: PDRB Kab. Purbalingga 2002 & Kab. Purbalingga Dalam Angka 2002

Tabel 4.6.
Perbandingan APBD Kabupaten Purbalingga 2002 – 2003

TAHUN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
2002	326.967.801.806	280.918.928.223
2003	374.539.878.477	350.145.317.549

Sumber: Nota Perhitungan APBD Kab. Purbalingga

Kesenjangan Antar Sektor. Kesenjangan antar sektor (lapangan usaha) diukur dengan menggunakan Indeks Williamson, menunjukkan angka kurang dari 1 (satu) dan kecenderungan mengalami penurunan walaupun relatif kecil yaitu 0,56 pada tahun 2001, menurun menjadi 0,36 pada tahun 2002. Hal ini berarti kesenjangan antar sektor tersebut relatif rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja masing-masing sektor mengalami pertumbuhan yang semakin merata. Untuk efisiensi investasi pembangunan sektoral, maka kebijakan alokasi anggaran sebaiknya diarahkan pada bentuk keterkaitan (backward and forward) pada masing-masing sektor.

Keuangan Daerah. Total APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2003 meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Pada Tahun 2002 total penerimaan sebesar Rp. 326.967.801.806, meningkat menjadi Rp. 374.539.878.477 pada tahun 2003. Kecenderungan peningkatan total APBD ini menunjukkan adanya perkembangan dinamis pada pelaksanaan kehidupan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Untuk mengetahui pengelolaan APBD, pada dasarnya menyangkut dua bidang yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kedua aspek tersebut meliputi:

1. Penerimaan/Pendapatan; yaitu analisis aktifitas kerja tahunan yang akan dicapai dibidang pendapatan mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

2. Pengeluaran/Belanja; yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat. Analisis pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Terdapat 3 (tiga) elemen pokok yang membentuk penerimaan/ pendapatan yaitu penerimaan dari pemerintah atasan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Kecenderungan-kecenderungan yang ada pada komponen penerimaan/pendapatan daerah pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 adalah sebagai berikut tabel 4.7.

Basis realisasi pendapatan yang paling besar pada pengamatan tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 adalah pada pos Penerimaan Pembangunan, Bagi hasil, bagian sumbangan dan bantuan atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah. Dominannya pendapatan dari pos ini akan berdampak pada sifat ketergantungan daerah pada bantuan level pemerintah di atasnya, hal ini akan sangat memprihatinkan dalam melaksanakan otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan sepenuhnya kepada daerah. Tantangan yang ada bagi daerah adalah bagaimana meningkatkan kemampuan keuangan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pusat.

Tabel 4.7.
Perkembangan Sumber-sumber Penerimaan Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 – 2003

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN		%
		2002	2003	
1.	Sisa Perhitungan	43.084.632.316	46.048.837.583	106.880
2.	P A D	23.603.055.603	28.304.235.610	119.918
3.	Bagi Hasil	11.615.908.700	17.367.209.210	149.512
4.	Sumbangan dan Bantuan	234.944.962.500	260.560.355.000	110.903
5.	Penerimaan Pembangunan	13.719.242.687	22.259.205.083	162.248

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kab. Purbalingga

Tabel 4.8
Belanja Rutin dan Pembangunan Kab. Purbalingga
Tahun 2002 - 2003

TAHUN	BELANJA RUTIN	%	BELANJA PEMBANGUNAN	%
2002	206.238.682.058	73,42	74.680.246.165	26,58
2003	252.629.910.199	72,15	97.515.407.350	27,85

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kab. Purbalingga

Pada pos Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat adanya kecenderungan positif pada penerimaan dari retribusi daerah, yang pada setiap perkembangan tahunnya menunjukkan peningkatan jumlah pendapatan secara signifikan.

Belanja Daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan, keperluan belanja rutin digunakan untuk pos belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin lainnya. Sedang belanja pembangunan digunakan untuk pembiayaan 20 sektor pembangunan. Berikut ini disajikan perkembangan belanja rutin dan perkembangan belanja pembangunan tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.

Kalau diamati pada tabel Realisasi Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 pengeluaran rutin lebih besar dari pada pengeluaran untuk pembangunan. Konsekuensi alokasi pengeluaran pada pos rutin dan pos pembangunan disamping dapat mengakibatkan kinerja pembangunan ekonomi daerah juga dapat mempengaruhi jumlah penerimaan daerah. Besarnya pengeluaran rutin dalam APBD dapat dikurangi dengan melakukan efisiensi pengeluaran melalui upaya rasionalisasi pengeluaran pada pos-pos rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan belanja perjalanan Dinas.

KESIMPULAN

Kondisi dampak pembangunan kesejahteraan dari sisi ekonomi antara lain terjadi:

1. Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003 berhasil meningkatkan PDRB sebesar 1,3%. Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Riil) Kabupaten Purbalingga sejak 2000 hingga 2003 cenderung meningkat dari Rp. 611.664,77 juta menjadi Rp. 668.305,74 juta. Kontribusi sektoral unggulan terhadap PDRB Kabupten Purbalingga pada tahun 2003 adalah: Pertanian 30,90% jasa-jasa sebesar 23,04%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 17,81%, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 11,66%.
2. Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Purbalingga belum mengalami perubahan yang signifikan dari struktur perekonomian primer (pertanian) menjadi struktur perekonomian sekunder (industri). Hasil pengolahan data LQ pada Kabupaten Purbalingga yang dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sektor perekonomian yang berangka indeks $LQ > 1$ dalam perkembangan setiap tahunnya tidak terjadi perubahan yang mencolok, dimana untuk tahun 2002. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis yang mempunyai peluang ekspor ke daerah lain, yang dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap produksi dan pendapatan masyarakat.

3. Kesenjangan antar sektor (lapangan usaha) diukur dengan menggunakan Indeks Williamson, menunjukkan angka kurang dari 1 (satu) dan kecenderungan mengalami penurunan walaupun relatif kecil yaitu 0,56 pada tahun 2001, menurun menjadi 0,36 pada tahun 2002. Hal ini berarti kesenjangan antar sektor tersebut relatif rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja masing-masing sektor mengalami pertumbuhan yang semakin merata. Untuk efisiensi investasi pembangunan sektoral, maka kebijakan alokasi anggaran sebaiknya diarahkan pada bentuk keterkaitan (backward and forward) pada masing-masing sektor.

Implikasi dari penelitian ini adalah :

1. Perencanaan yang bersifat strategis di tingkat daerah, yang tercantum dalam Renstra Kabupaten harus dapat dijabarkan ke dalam kegiatan yang bersifat operasional dan berdimensi sektoral dalam dokumen perencanaan lain secara sistematis, relevan dan konsisten. Kondisi demikian akan memudahkan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah secara makro sektoral.
2. Dalam untuk lebih memudahkan pemantauan dan evaluasi sejauhmana tingkat kinerja pembangunan daerah secara makro sektoral (daerah), perlu dilakukan upaya perumusan dan penetapan indikator pembangunan daerah yang disepakati dan dijadikan acuan setiap

setiap sektor pembangunan. Hal ini juga disertai dengan aktivitas pendataan dan pelaporan yang lebih efektif, terutama yang bersifat kuantitatif terkait dengan kinerja pembangunan sektoral.

3. Pengeluaran rutin dalam APBD dapat dikurangi dengan melakukan efisiensi pengeluaran melalui upaya rasionalisasi pengeluaran pada pos-pos rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan belanja perjalanan dinas dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Purbalingga Dalam Angka*. Biro Pusat Statistik kabupaten purbalingga. 2003

_____. *Rencana Strategis Daerah 2003*. Kabupaten Purbalingga 2003.

_____. *Rencana Strategis Bappeda 2003*. Kabupaten Purbalingga. 2003

Hera Susanti, Moh. Ikhsan, Widyanti. 1995. *Indikator Makro Ekonomi*. LP-FE UI. Jakarta

Lincoln Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE UGM. Yogyakarta